

Hasil Penelitian

KAJIAN KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM MENGHADAPI PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) KAWASAN INDUSTRI TERPADU (KIT) BATANG

(STUDY OF THE READINESS OF BATANG REGENCY GOVERNMENT IN FACING THE NATIONAL STRATEGIC PROJECT (PSN) OF BATANG INTEGRATED INDUSTRIAL ZONE)

Satya Budi Nugraha, Ananto Aji*, Husna Fauzia***

*Universitas Negeri Semarang
Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang 50229
Jawa Tengah - Indonesia
Email: satyabnugraha@mail.unnes.ac.id

**Dinas Pekerjaan Umum, Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Jl. Madukoro Blok AA-BB Tawangmas, Semarang Barat, Semarang 50144
Jawa Tengah – Indonesia

Diterima: 28 April 2022; Direvisi: 13 September 2023; Disetujui: 14 April 2023

ABSTRAK

Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT Batang) merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Proyek ini sejalan dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Batang, yaitu terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang memiliki daya tarik bagi investasi pada sektor industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam aspek kebijakan, kelembagaan, finansial, sarana dan prasarana dalam menghadapi PSN Kawasan Industri Terpadu Batang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur dan wawancara. Selanjutnya data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif dan analisis skoring. Kriteria kesiapan daerah dinilai berdasarkan perhitungan skor dengan kategori tidak siap, cukup siap, siap, dan sangat siap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Batang termasuk dalam kategori sangat siap untuk menyambut PSN KIT Batang. Kebijakan pada level daerah menunjukkan respon yang baik dan cepat dari Pemda terhadap kebijakan nasional. Demikian pula dalam konteks penyiapan program-program rencana tata ruang di sekitar KIT Batang, pembangunan infrastruktur dan pengalokasian anggaran telah direncanakan dengan cepat dan terprogram, sehingga proses pembangunan KIT Batang saat ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya Pemda Batang perlu memfasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan dan keterampilan masyarakat agar pada saatnya nanti memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.

Kata kunci: kesiapan daerah, proyek strategis nasional, kawasan industri, Batang

ABSTRACT

The Batang Integrated Industrial Zone (KIT Batang) development is one of the National Strategic Projects (PSN) stipulated by Presidential Regulation. This project is in line with the spatial planning objective of Batang Regency, namely the realization of Regency space that has an attractiveness for investment in the industrial sector. This study aims to analyze the readiness of the Regional Government of Batang Regency in terms of policy, institutional, financial, facilities, and infrastructure aspects in dealing with the PSN for the Batang Integrated Industrial Zone. Data was collected by using literature study and interview methods. Furthermore, the data and information obtained were analyzed by descriptive methods and scoring analysis. Regional readiness criteria are assessed based on the calculation of scores in the categories of not ready, quite ready, ready, and very ready. The results showed that the Regional Government (Pemda)

of Batang Regency was included in being very ready to welcome PSN KIT Batang. Policies at the regional level show a good and fast response from the local government to national policies. Likewise, in preparing spatial planning programs around the Batang KIT, infrastructure development and budget allocations have been planned quickly and programmed so that the current Batang KIT development process runs smoothly. Furthermore, the Batang local government needs to facilitate the improvement of the educational qualifications and skills of the community so that in time they have competencies that follow the needs of workers in the industrial sector.

Keywords: regional readiness, national strategic project, industrial zone, Batang

PENDAHULUAN

Kabupaten Batang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional melalui pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang-KIT Batang (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional). Proyek ini sejalan dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Batang, yaitu terwujudnya ruang wilayah Kabupaten yang memiliki daya tarik bagi investasi pada sektor industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan (Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039).

Sehingga terjadi perluasan sektor yang menjadi tumpuan dalam pengembangan ekonomi, yaitu dari investasi pada industri yang bertumpu pada sektor pertanian (Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031), menjadi investasi pada sektor industri, pertanian, perikanan dan pariwisata (Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039). Sektor-sektor tersebut sekaligus menggambarkan potensi yang dimiliki daerah (Kabupaten Batang) dengan tetap berupaya menarik investasi pada sektor industri.

Menurut sejarahnya, perekonomian daerah Batang didominasi oleh kegiatan pertanian yang terbatas pada aktivitas produksi (budidaya), sedangkan permasalahan yang muncul berkaitan dengan pengadaan sarana dan prasarana, pengolahan hasil, jalur distribusi dan pemasaran hasil produksi (Afikah, 2012). Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Batang untuk menerapkan strategi pengembangan wilayah yang bertumpu pada sektor-sektor strategis dan potensial lainnya, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi sesuai target, termasuk di dalamnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan strategi yang diupayakan Pemerintah Pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan daerah, terlebih akibat pandemi Covid-19 (Nurchaya, 2021). Strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Pemda Batang) dalam pengembangan wilayah terutama pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industri, yaitu meliputi pengembangan kawasan peruntukan industri di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura), pengembangan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, pengembangan industri kreatif yang berbahan baku lokal di setiap kecamatan, serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri (Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039).

Proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk direalisasi dalam waktu yang singkat, dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional - PSN (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2016). Proyek tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur. Beberapa kategori proyek strategis nasional ini meliputi pembangunan infrastruktur jalan tol dan jalan strategis nasional non-tol, bandar udara, prasarana dan sarana kereta api antar kota, infrastruktur energi asal sampah, penyediaan air minum, pariwisata, pembangunan kawasan industri prioritas, infrastruktur pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam kategori pembangunan kawasan industri prioritas, maka KIT Batang termasuk salah satu yang diprioritaskan sejak ditetapkan pada tahun 2020 (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional).

Pada berbagai kajian tentang kawasan industri, sebagian memfokuskan pada berbagai analisis tentang penentuan lokasi yang ideal untuk penempatan/pengembangan kawasan industri atau dalam penentuan kawasan peruntukan industri (Nugraha, Subiyanto and Wijaya, 2015; Kandiawan, Hani'ah and

Subiyanto, 2017; Cahyadi, Suprayogi and Amarrohman, 2018). Sedangkan sebagian yang lain fokus pada strategi pengembangan kawasan industri dengan model *mixed-use* maupun pengelolaan kawasan industri berkelanjutan (Sulaiman et al., 2008; Azis and Fazri, 2014; Pinem, 2016; Wikaningrum, 2016). Belum banyak penelitian yang membahas tentang kesiapan daerah dalam konteks menyambut proyek strategis nasional, dalam hal ini adalah pembangunan kawasan industri prioritas. .

Meskipun telah banyak pula hasil penelitian yang memfokuskan pada kesiapan dari sisi masyarakat, termasuk persepsi masyarakat pada pembangunan kawasan industri (Ga'i, Hidayat and Santoso, 2010; Kurniati, Meidiana and Wicaksono, 2015; Setiawan et al., 2016). Oleh karena itu, penelitian ini menarik dan memiliki urgensi untuk dilakukan, terlebih Kabupaten Batang sebagai lokasi pelaksanaan salah satu proyek strategis nasional perlu menyiapkan berbagai hal terkait implementasi pembangunan tersebut. Kesiapan daerah ini dapat dikategorikan dalam aspek kebijakan, kelembagaan, finansial, sarana dan prasarana pendukung kawasan industri.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kesiapan daerah dalam menghadapi pembangunan kawasan industri. Kawasan Industri Terpadu Batang merupakan Proyek Strategis Nasional yang penetapannya relatif cepat, karena merupakan proyek yang dipindahkan lokasinya dari rencana awal di daerah lain. Hal ini mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Batang harus menerima dengan cepat kebijakan tersebut dan segera berbenah dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah, "bagaimana kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Batang dalam menghadapi pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang".

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Batang, secara spesifik pada lokasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Terpadu Batang. Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang sesuai rencana akan dibangun pada lahan seluas 4.300 Ha. Pembangunan KIT batang tersebut dibagi menjadi tiga klaster. Klaster 1 akan dibangun seluas 3100 Ha, klaster ke-2 seluas 800 Ha dan klaster ke-3 seluas 400 Ha. KIT Batang dibangun di tanah milik PTPN IX Siluwok. Secara administratif, KIT Batang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Desa Sidorejo, Krengseng, Lebo dan Pelen di sebelah timur, Desa Sawangan dan Desa

Ketanggan di sebelah selatan, serta Desa Kedawung di sebelah barat.

KIT Batang berada pada lokasi yang strategis, yaitu pada koridor utara kawasan industri di Pulau Jawa dengan aksesibilitas yang baik. KIT Batang berjarak \pm 50 km dari Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, \pm 65 km dari Pelabuhan Tanjung Emas, \pm 4 jam perjalanan darat dari Ibukota Negara (DKI Jakarta), dan \pm 1 jam perjalanan darat dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang). Selain itu, KIT Batang juga berjarak cukup dekat dari Kawasan Industri Kendal (\pm 30 km) dan Pelabuhan Kendal (\pm 40 km). Variabel yang digunakan untuk menganalisis kesiapan Pemda Batang dalam menghadapi PSN KIT Batang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, finansial, serta sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi jaringan jalan; jaringan air bersih, jaringan persampahan, jaringan pengelolaan limbah, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan energi (gas).

Pengumpulan data dilakukan dengan metode Studi Literatur dan Dokumen yang bertujuan untuk mengumpulkan data rencana pembangunan PSN KIT Batang, serta aspek-aspek penilaian terhadap kesiapan daerah Kabupaten Batang dalam menghadapi PSN KIT Batang pada data-data sekunder yang terdapat dalam dokumen milik instansi terkait. Selain itu juga dilakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang lebih mendalam terkait pembangunan PSN KIT Batang melalui informan-informan kunci baik dari personil pemerintah maupun stakeholder lain.

Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data dan informasi dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu untuk menjabarkan informasi yang diperoleh tentang PSN KIT Batang. Penjabaran mengenai Proyek Pembangunan PSN KIT Batang mencakup lokasi, kondisi geografis, rencana peruntukan lahan, dan rencana jaringan infrastruktur. Selain itu juga menggunakan analisis skoring untuk menganalisis kesiapan daerah dalam aspek kebijakan, kelembagaan, finansial, serta sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi PSN KIT Batang. Skor tertinggi diberi nilai satu (1) dan terendah diberi nilai nol (0). Rincian skoring untuk masing-masing variabel pada tujuan penelitian kedua dijelaskan dalam Tabel 1. Selanjutnya berdasarkan hasil skoring, dilakukan analisis untuk mengkategorikan hasil perhitungan total skor dengan kriteria seperti pada Tabel 2.

Tabel 1. Skoring Variabel Penelitian

No.	Variabel	Keterangan	Skor
1.	Kebijakan	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
2.	Kelembagaan	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
3.	Finansial (APBD)	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
4.	Jaringan Jalan	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
5.	Jaringan Air Bersih	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
6.	Jaringan Persampahan	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
7.	Jaringan Pengolahan Limbah	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
8.	Jaringan Listrik	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
9.	Jaringan Telekomunikasi	• Ada	1
		• Tidak Ada	0
10.	Jaringan Energi (Gas)	• Ada	1
		• Tidak Ada	0

Sumber: Analisis Peneliti (2021)

Tabel 2. Kategori/Kriteria Kesiapan Daerah

No.	Rentang Jumlah Skor	Keterangan
1.	7.6 - 10	Sangat Siap
2.	5.1 - 7.5	Siap
3.	2.6 - 5	Cukup Siap
4.	0 - 2.5	Tidak Siap

Sumber: Analisis Peneliti (2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Batang dalam menghadapi pembangunan KIT Batang dianalisis berdasarkan aspek: kebijakan, kelembagaan, finansial, sarana dan prasarana, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Aspek Kebijakan. Pemerintah melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan KIT Batang dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Didalam Huruf E (Sektor Kawasan) Nomor 108 terdapat kawasan industri Batang. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Pengembangan KIT Batang tersebut sejalan dengan Rencana Tata Ruang Jawa-Bali seperti

tertuang di dalam Pasal 54 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pengembangan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri, meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri, peningkatan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri, dan peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan dilakukan di Kabupaten Batang. Dengan Adanya KIT Batang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di Kabupaten Batang, dan Jawa Tengah pada umumnya.

Setelah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang merupakan Kebijakan di level nasional tersebut mendorong Pemerintah Daerah baik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Batang untuk merespon dengan melakukan penyesuaian pada kebijakan di

daerah. Salah satunya adalah kebijakan penataan ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 menyebutkan pada Pasal 17 Ayat (3) huruf g angka 2 menjelaskan bahwa arah pengembangan wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan (WP Petanglong) yang berpusat di kawasan perkotaan pekalongan didasarkan pada sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa, pertanian dan perikanan, serta lokasi rencana pengembangan Kawasan Industri batang telah terakomodir dalam kawasan peruntukan industri seluas ± 450 Ha.

Berdasarkan Perda Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten batang Tahun 2019-2039, Pasal 7 ayat (3) menyebutkan strategi pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri yang berkualitas antara lain mengembangkan kawasan peruntukan industri di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura) dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri, serta lokasi rencana pengembangan kawasan industri terpadu batang telah terakomodir dalam kawasan peruntukan industri seluas ± 450 Ha.

Berdasarkan kedua Perda tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah maupun RTRW Kabupaten Batang bahwa Rencana Pembangunan Kawasan Industri Batang seluas 4300 Ha tersebut, hanya seluas 450 ha yang telah terakomodir di dalam pola ruang kawasan peruntukan industri. Sesuai dengan Pasal 114 A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) bahwa dalam pemerian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang.

Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sesuai dengan Pasal 34 A Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang memuat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis namun belum dimuat dalam rencana tata ruang daerah dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dengan adanya aturan diatas terkait kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KIT Batang seluas 3850 Ha yang belum terakomodir di dalam rencana tata ruang baik

RTRWP Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Batang dapat dilaksanakan dengan KKPR dari Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia.

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang rencana Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Kabupaten Batang telah dilakukan oleh Menteri ATR/BPN dengan Nomor Surat Pf.01/42-200/II/2021 Tanggal 5 Februari 2021. Dimana setelah dilakukan kajian peraturan perundang-undangan terkait rencana pengembangan Kawasan Industri Tepadu Batang seluas 3100 ha (Klaster 1), 800 ha (Klaster 2) dan 400 ha (Klaster 3) telah sesuai tata ruang. Selain kajian terkait peraturan perundang-undangan juga dilakukan kajian teknis terkait kebutuhan air bersih yang terdapat di sekitar wilayah KIT Batang.

Berdasarkan masterplan KIT Batang, kebutuhan air untuk lahan seluas 3.100 ha pada Klaster 1 dapat dipenuhi dengan debit air 1.625 liter/detik. Hal ini dapat dipenuhi dari DAS Urang. Berdasarkan neraca air Das Urang debit yang tidak dimanfaatkan 120,38 juta m³/tahun atau 3.817,07 liter/detik. Dengan demikian sisa debit air dapat digunakan sebagai cadangan air di musim kemarau. Pelaksanaan pengembangan KIT Batang sesuai dengan KKPR yang dikeluarkan harus memeperhatikan beberapa hal diantaranya: a) Pengembangan Klaster 1 dapat dilanjutkan sesuai dengan masterplan KIT batang dengan memperhatikan perlunya pembuatan tempat penampungan air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku; b) Pengembangan Klaster 2 dan 3 dapat dilanjutkan sesuai dengan masterplan KIT batang dengan terlebih dahulu membuat Kajian Ketersediaan air baku; c) Selanjutnya berdasarkan hasil skoring, dilakukan analisis untuk mengkategorikan hasil perhitungan total skor dengan kriteria seperti pada Tabel 2; dan d) Pelaksanaan Klaster 1,2 dan 3 perlu dilengkapi dengan kajian rekayasa lalu lintas.

Aspek Kelembagaan. Berdasarkan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Juni 2020 ke lokasi Batang Integrated Industrial Park, telah ditandatangani Nota Kesepahaman Tiga Pihak antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara IX sebagai anak perusahaan induk dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: 1/MOU/KIW/06/2020, MOU/10/9.8SM/2020 dan 271/EXT/PP/DU/ 2020 tentang Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang. Nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen masing-masing perusahaan kepada Presiden Republik Indonesia untuk

membangun dan mengelola Batang Integrated Industrial Park.

Saat ini telah ditandatangani kesepakatan konsorsium antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Perumda Aneka Usaha) Batang di Kabupaten Batang mengenai Pengembangan Batang Terintegrasi Kawasan Industri, PT PP nomor: 318/EXT/PP/PO/2020, PTPN IX: SPK/021/9.8SM/2020, PT KIW: 7/Perj/KIW/7/2020, PDAU: 539/PDAU/112/VII/2020. Konsorsium PT Property Pembangunan (Property) Tbk, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero), PT Perkebunan Nusantara IX dan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Batang.

Aspek Finansial, Sarana dan Prasarana.

Guna mendukung rencana pengembangan KIT Batang, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, telah mempersiapkan penganggaran pembangunan infrastruktur untuk mendukung KIT Batang. Beberapa proyek infrastruktur telah dipersiapkan pemerintah dalam mendukung pengembangan KIT Batang diantaranya:

- a. Untuk mendukung konektivitas pemerintah pusat telah menyelesaikan pembangunan simpang susun (SS) Akses KIT Batang. Proyek tersebut merupakan bagian dari ruas jalan Tol Batang-Semarang sepanjang 3,1 Km. Pembangunan Simpang Susun KIT Batang tersebut dilakukan sejak November 2020 dan selesai Juli 2021 dengan nilai kontrak 142,3 milyar
- b. Pembangunan jalan KIT Batang sepanjang 50 km secara *multiyears contract* (MYC) 2020-2022 dilakukan oleh Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR
- c. Untuk memenuhi ketersediaan sumber air baku pemerintah pusat melalui Balai Besar

wilayah Sungai Pemali Juana, Dirjen SDA mempersiapkan pembangunan Bendung Sungai Urang seluas 29,32 m³ dan Bendung Kedung Langgar seluas 142 hektare. Pembangunan bendungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan air baku.

- d. Selain pemenuhan air baku Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana juga menganggarkan untuk penanganan drainase di empat titik yakni Sungai Mata Air sepanjang 400 meter, Sungai Brontok 770 meter, Sungai Pelabuhan 861 meter, dan Sungai Pesanggrahan 100 meter.
- e. Di bidang permukiman Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Jawa Tengah telah menganggarkan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 285 liter/detik, Instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) berkapasitas 18.000 m³ perhari dan TPST berkapasitas 35 ton per hari.
- f. Untuk menampung para pekerja di KIT Batang pemerintah tengah dibangun rumah susun pekerja dengan tipw barak setinggi lima lantai. Total rusun yang akan dibangun berjumlah 10 tower yang dibagi menjadi 3 paket yaitu paket 1 terdiri empat tower, dan paket 2 dan 3 masing-masing 3 tiga tower. Pelaksanaan pembangunan rusun pekerja disebut ditargetkan selesai pada April 2022.
- g. Selain itu pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Batang telah menganggarkan pembangunan maupun peningkatan infrastruktur-infrastruktur untuk mendukung KIT Batang diantaranya peningkatan jalan, provinsi, jalan kabupaten, jaringan transmisi dan distribusi sistem penyediaan air minum.

Tabel 3. Skoring Tingkat Kesiapan Pemerintah

No.	Variabel	Keterangan	Skor
1.	Kebijakan	Ada	1
2.	Kelembagaan	Ada	1
3.	Finansial	Ada	1
4.	Jaringan Jalan	Ada	1
5.	Jaringan Air Bersih	Ada	1
6.	Jaringan Persampahan	Ada	1
7.	Jaringan Pengolahan Limbah	Ada	1
8.	Jaringan Listrik	Ada	1
9.	Jaringan Telekomunikasi	Ada	1
10.	Jaringan Energi (Gas)	Ada	1
Total			10

Sumber: Analisis Peneliti (2021)

Analisis Tingkat Kesiapan Pemerintah Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya tentang kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam menghadapi PSN KIT Batang, aspek-aspek yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat diberi skor untuk menyatakan kesiapan tersebut dalam bentuk angka, dengan rincian sebagaimana dijabarkan pada Tabel 3. Seluruh aspek yang dinilai pada kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, dinyatakan ada. Oleh karena itu, apabila dinyatakan dalam konteks klasifikasi kesiapan, maka Pemkab Batang termasuk kategori **sangat siap** dalam menyambut PSN KIT Batang.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber terkait Proyek KIT Batang, diperoleh informasi bahwa seluruh dinas perangkat daerah di Kabupaten Batang memang sudah memiliki kesiapan yang baik dalam menyambut Proyek KIT Batang. Kebijakan dari level Pemda Kabupaten Batang sebagai bentuk respon terhadap kebijakan nasional ini diantisipasi dengan baik dan cepat. Demikian pula dalam konteks penyiapan program-program rencana tata ruang di sekitar KIT Batang, pembangunan infrastruktur dan pengalokasian anggaran telah direncanakan dengan cepat dan terprogram. Hal ini berarti bahwa Pemkab Batang yang telah ditetapkan wilayahnya sebagai lokasi proyek strategis nasional, dapat memberikan respon dengan baik, sehingga pembangunan KIT Batang dapat berjalan dengan lancar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengkaji kesiapan Pemerintah Kabupaten Batang dalam menghadapi PSN KIT Batang, dapat disimpulkan bahwa kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang berdasarkan analisis pada aspek kebijakan, kelembagaan, finansial, sarana dan prasarana menunjukkan bahwa Pemkab Batang termasuk kategori sangat siap dalam menyambut PSN KIT Batang. Kebijakan dari Pemda Kabupaten Batang sebagai bentuk respon terhadap kebijakan nasional ini dikeluarkan dan ditetapkan dengan baik dan cepat. Demikian pula dalam konteks penyiapan program-program rencana tata ruang di sekitar KIT Batang, pembangunan infrastruktur dan pengalokasian anggaran telah direncanakan dengan cepat dan terprogram.

REKOMENDASI

PSN KIT Batang saat ini sedang dalam tahap pembangunan, namun demikian sudah mampu menarik tenaga kerja dan peluang usaha

yang bagus bagi masyarakat sekitar. Beberapa saran yang dapat diberikan untuk Pemerintah Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Batang dapat melanjutkan inventarisir SDM berdasarkan kelompok usia dan tingkat pendidikan, untuk memetakan kondisi SDM di Kabupaten Batang sehingga dapat menyiapkan program untuk peningkatan keterampilan calon tenaga kerja di industri.
2. Pemerintah Kabupaten Batang perlu memberikan fasilitasi untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan memberikan pelatihan kepada masyarakat agar pada saatnya nanti memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan pendanaan dari DIPA Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang untuk pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Batang atas kesediannya untuk menjadi narasumber serta penyedia data dan informasi yang dimanfaatkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afikah, Z. 2012. 'Tata Kota Dan Perekonomian Batang Tahun 1986-1998', *Journal of Indonesian History*, 1(1), pp. 49-54.
- Azis, A. M. and Fazri, R. 2014. 'Strategi Pengembangan Mixed Use sebagai Penunjang Kegiatan Industri Kota Cilegon', *Jurnal Planesa (Planologi)*, 5(2).
- Cahyadi, A. I. B., Suprayogi, A. and Amarrohman, F. J. 2018. 'Penentuan Lokasi Potensial Pengembangan Kawasan Industri Menggunakan Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten Sukoharjo', *Jurnal Geodesi Undip*, 7(1), pp. 163-171.
- Ga'i, A., Hidayat, W. and Santoso, E. 2010. 'Kajian Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonomi', *Jurnal Tata Kota dan Daerah*, 2(1), pp. 1-15.
- Kandiawan, U. F., Hani'ah, H. and Subiyanto, S. 2017. 'Penentuan Kawasan Peruntukan Industri Menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) Dan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Sragen)', *Jurnal Geodesi Undip*, 6(4), pp. 9-17.
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. 2016. *Proyek Strategis Nasional*. [Online] Dari: <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional> [Diakses: 23 Maret 2021].

Kurniati, E., Meidiana, C. and Wicaksono, A. 2015. 'Kajian Kesiapan Masyarakat Terkait Rencana Kegiatan Industri Pertambangan Marmer (Studi Kasus Di Kelurahan Oi Fo'o, Kota Bima-NTB)', *Indonesian Green Technology Journal*, 4(1), pp. 18-27.

Nugraha, W. S., Subiyanto, S. and Wijaya, A. P. 2015. 'Penentuan Lokasi Potensial untuk Pengembangan Kawasan Industri Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kabupaten Boyolali', *Jurnal Geodesi Undip*, 4(1), pp. 194-202.

Nurchaya, I. A. H. 2021. *KIT Batang Bakal Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional*, <https://ekonomi.bisnis.com>. [Online] Dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210207/257/1353295/kit-batang-bakal-dorong-pemulihan-ekonomi-nasional> [Diakses: 23 Maret 2021].

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pinem, D. E. 2016. 'Menemukan Strategi Pengembangan Kawasan Industri Melalui Analisis Sektor Unggulan Kota Binjai', *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 4(1), pp. 45-64.

Setiawan, F. *et al.* 2016. 'Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Pengembangan Kawasan Industri Sentolo di Kabupaten Kulonprogo', *Jurnal Bumi Indonesia*, 5(4), pp. 1-9.

Sulaiman, F. *et al.* 2008. 'Strategi Pengelolaan Kawasan Industri Cilegon Menuju Eco Industrial Park', *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 19(2), pp. 37-57.

Wikaningrum, T. 2016. 'Kajian Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri Studi Kasus di Kawasan Industri Jababeka Bekasi', *Journal of Env. Engineering & Waste Management*, 1(2), pp. 75-83.